

2023



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PUDING BESAR  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
PUDING BESAR  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan Kantor Kecamatan Puding Besar telah tersusun. Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan Kedua, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan renja tahun 2023 ini. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Puding Besar, 21 Agustus 2023  
CAMAT PUDING BESAR



**ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 19841130 200212 1 002**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	11
2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023. ....	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	22
3.1.Perubahan Belanja SKPD Tahun 2023 .....	22
3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD .....	27
BAB IV PENUTUP .....	35
LAMPIRAN.....	36

**DAFTAR TABEL :**

Tabel 2.1.a Rekapitulasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023. ....	13
Tabel 2.1.b Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023. ....	15
Tabel 3.1.a Rekapitulasi Perubahan Pagu Kecamatan Puding Besar Sesuai Perubahan RKPD Kabupaten Bangka 2023 .....	23
Tabel 3.1.b Rekapitulasi Perubahan Pagu Kecamatan Puding Besar Sesuai Perubahan Anggarannya.....	24
Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 .....	28

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjutnya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan- kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam renja juga memuat permasalahan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya untuk dapat lebih baik di tahun selanjutnya.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program program perangkat daerah lainnya.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (renstra) tahun 2019-2023. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-

faktor yang akan mempengaruhi, aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketata laksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Kantor Kecamatan Puding Besar tahun 2019-2023 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 2 (dua) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-



- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
  26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
  27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK masing-masing Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
  29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
  30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
  31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi OPD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 Yang Sedang Berjalan;

1. Alat koordinasi program dan kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Puding Besar;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah:

1. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk Membangun koordinasi perencanaan pembangunan yang efektif dalam kerangka sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau

tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN

**BAB II.****EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN****2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023**

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Puding Besar tidak terlepas dengan pembangunan di kabupaten yang dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan ditingkat perangkat daerah direncanakan dalam Renstra untuk jangka waktu lima tahun, dan Renja untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/ kegiatan/ sub kegiatan dikaitkan dengan proses / tahapan perencanaan sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II tahun berkenaan digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian program/kegiatan/subkegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan/subkegiatan tersebut. Evaluasi hasil Renja sampai dengan triwulan II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Realisasi target kinerja output kegiatan pada kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih berproses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Triwulan II Tahun Anggaran 2023 yang melaksanakan, 5 Program dengan 11 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp. 3.911.307.840,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan

triwulan II Tahun 2023 Sebesar Rp 1.553.420.697,- atau 48,23%.

Adapun Rekapitulasi realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada table 2.1.a dibawah ini:



**Tabel 2.1.a**  
**Rekapitulasi Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

No.	Program	Realisai (%)			
		Kinerja	Kategori*	Keuangan	Kategori*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,57%	SR	37,18%	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35,70%	SR	32,21%	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94,19%	ST	87,98%	T
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,39%	SR	55,39%	R
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32,40%	SR	33,33%	SR

Keterangan Kategori*		
Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR



Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan Triwulan II adalah:

- a. Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan belum berjalan dengan optimal sehingga terjadi keterlambatan dalam memulai penatausahaan pelaksanaan kegiatan.
- b. Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- c. Alokasi Dana untuk beberapa Program/Kegiatan tidak tersedia di tahun Anggaran berjalan dikarenakan keterbatasan keuangan Daerah.
- d. Alokasi Dana untuk setiap kegiatan bervariasi terbagi pada triwulan yang berbeda.
- e. kekurangan Sarana dan Prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II secara total dapat dilihat pada table 2.1.b dibawah ini:

Tabel 2.1.a  
Evaluasi Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD  
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka  
Periode Pelaksanaan : Triwulan I - II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 15 = 14/6 x 100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						I			II				13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%												
1	2	3					4		5	6		7		8		9		10				13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
		7					URUSAN KEWILAYAHAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		7	01				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN PUDING BESAR		10.184.081.121		5.427.041.538		3.911.307.840		537.880.093			1.015.540.604			1.553.420.697			6.980.462.235		68,54				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	28,00	9.507.208.121	25,93	5.167.378.538	28,00	3.768.427.840	0,00		499.130.258	0,00		957.595.604	0,00		1.456.725.862	25,93	6.624.104.400	92,61	69,67	KEC. PUDING BESAR		
								Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,35		10,07		11,35	0,00			0,00		0,00		0,00			10,07		88,72				
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00		100				
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	64,44		64,10		64,44	0,00			0,00		0,00		0,00			64,10		99,47				
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana							Indeks Sarana dan Prasarana	80,00		70,00		80,00	0,00			0,00		0,00		0,00			70,00		87,50				
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah							Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2,05		1,75		2,05	0,00			0,00		0,00		0,00			1,75		85,37				
	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	203.662.392	100	34.855.900	100	13.750.000	66,67		-	0,00		4.290.000	66,67		4.290.000	100		39.145.900	100	19,22		
	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar							Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100		100		100	25,00			0,00		0,00		25,00			100		100				
	Terlaksananya perencanaan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	19	104.132.416	14	25.763.900	6	5.650.000	66,67	4		0,00		-	66,67	4		-	18	25.763.900	94,74	24,74		
		7	01	01	2	01	02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	840.000			5	840.000	0,00	0		0,00		-	0,00	0		-	0	0,00	0,00			
		7	01	01	2	01	03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	840.000			2	840.000	0,00	0		0,00		-	0,00	0		-	0	0,00	0,00			
		7	01	01	2	01	04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	840.000			2	840.000	100	2		0,00		-	100,00	2		-	2	100,00	0,00			
		7	01	01	2	01	05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	840.000			2	840.000	0,00	0		0,00		-	0,00	0		-	0	0,00	0,00			
	Terlaksananya pelaporan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun (dokumen)	57	95.329.976	38	9.092.000	4	3.900.000	25,00	1		0,00		3.600.000	25,00	1		3.600.000	39	12.692.000	68,42	13,31		

		7	01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	840.000			8	840.000	25,00	2		0,00		690.000	25,00	2	690.000	2	690.000	25,00	82,14	
Meningkatnya pelaporan keuangan sesuai standar		7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	6.206.439.054	100	3.354.789.097	100	2.392.147.200	25,00		259.327.547	0,00		650.819.892	25,00		910.147.439	100	4.264.936.536	100	68,72	
		7	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlangani (bulan)	36	6.144.609.054	24	3.354.789.097	12	2.374.477.200	25,00	3	244.329.207	0,00		650.819.892	25,00	3	895.149.099	27	4.249.938.196	75,00	69,17	
		7	01	01	2	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	15.990.000			12	15.990.000	25,00	3	14.998.340	0,00		-	25,00	3	14.998.340	3	14.998.340	25,00	93,80	
		7	01	01	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	840.000			2	840.000	100,00	2	-	0,00		-	100,00	2	-	2	-	100,00	0,00	
		7	01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (dokumen)	42	45.000.000	28	-	40	840.000	25,00	10		0,00		-	25,00	10	-	38	-	90,48	0,00	
		7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	46,67	354.158.555	0,00	44.760.000	26,67	32.915.000	0,00		-	0,00		11.690.000	0,00		11.690.000	0,00	56.450.000	0,00	15,94	
									Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100		100		100		25,00			0,00			25,00			100		100		
									Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100		100		100		25,00			0,00			25,00			100		100		

			7	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Yang Tersedia (stell)	81	173.470.000	35	44.760.000	0	32.075.000	0,00	0,00	-	0,00	11.000.000	0,00	0	11.000.000	35	55.760.000	43,21	32,14		
									Jumlah pakaian olahraga yang tersedia (stell)	48			16		0		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	16	-	33,33			
									Jumlah pakaian adat yang tersedia (stell)	81			35		0		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	35	-	43,21			
									Jumlah pakaian Paskibra yang tersedia (stell)	70			0		0		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00			
									Jumlah pakaian Peserta MTQ Tk. Kabupaten yang tersedia (stell)	105			35		0		0,00	0,00	-	35,00		35,00	0	-	35	-	33,33			
									Jumlah pakaian olah raga paskibra (stell)	60			10		0		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	10	-	16,67			
									Jumlah pakaian PDL Camat yang tersedia (stell)	1			1		0		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	1	-	100			
									Jumlah pakaian PSL Camat yang tersedia (stell)	1			1		0		0,00	0,00		0,00		0,00	0		1	-	100			
									Jumlah pakaian PSR Camat yang tersedia (stell)	1			1		0		0,00	0,00		0,00		0,00	0		1	-	100			
									Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6					6		0,00	0		0,00		0,00	0	-	0	-	0,00			
			7	01	01	2	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	11	840.000			11	840.000	27,27	3		0,00	690.000	27,27	3	690.000	3	690.000	27,27	82,14		
			7	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparatur yang mengikut pendidikan dan pelatihan formal (orang)	12	179.848.555	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
			7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80,00	402.671.560	70,00	250.792.890	80,00	286.485.850	25,00		48.851.702	0,00	77.331.467	25,00		126.183.169	70	376.976.059	87,50	93,62		
			7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	289.003.000	24	250.792.890	12	172.817.290	25,00	3	30.532.190	0,00	47.227.199	25,00	3	77.759.389	27	328.552.279	75,00	113,68		
									Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Tertangani (bulan)	36			24		12		25,00	3		0,00		25,00	3	-	27	-	75,00			
			7	01	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	12	56.834.280			12	56.834.280	25,00	3	9.159.756	0,00	14.864.634	25,00	3	24.024.390	3	24.024.390	25,00	42,27		
			7	01	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	56.834.280			12	56.834.280	25,00	3	9.159.756	0,00	15.239.634	25,00	3	24.399.390	3	24.399.390	25,00	42,93		

			7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80,00		307.700.000	70,00		141.180.000	80,00		160.475.665	0,00					48.060.000	0,00				45.850.000	0,00			93.910.000	70,00		235.090.000	87,50	76,40	
			7	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (paket)	158		105.050.000	50		28.050.000	1		48.788.950	100	1				48.060.000	0,00				-	100,00	1		48.060.000	51		76.110.000	32,28	72,45	
			7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	90		140.100.000	59		113.130.000	9		49.136.715	0,00	0,00			-	9,00				45.850.000	9,00	0		45.850.000	59		158.980.000	65,56	113,48		
			7	01	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1		62.550.000				1		62.550.000	0,00	0,00			-	0,00				-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00		
			7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100		1.491.878.130	100		1.154.958.199	100		574.266.985	25,00				127.964.531	0,00				151.714.428	25,00			279.678.959	100		1.434.637.158	100	96,16		
										Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	3			3			3			3					0,00				3,00				3			100				
			7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36		1.158.500.000	24		968.542.247	12		447.376.545	25,00	3			99.831.292	0,00				122.769.877	25,00	3		222.601.169	27		1.191.143.416	75,00	102,82		
			7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36		131.203.330	24		70.186.300	12		39.417.360	25,00	3			10.944.200	0,00				6.654.200	25,00	3		17.598.400	27		87.784.700	75,00	66,91		
										Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	36			24			0			0,00	0			0,00				0,00	0		-	24		-	66,67					
										Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	36			24			0			0,00	0			0,00			0,00	0		-	24		-	66,67						
			7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36		202.174.800	24		116.229.652	12		87.473.080	25,00	3			17.189.039	0,00				22.290.351	25,00	3		39.479.390	27		155.709.042	75,00	77,02		
			7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100		540.698.430	100		186.042.452	100		308.387.140	25,00				14.926.478	0,00				15.899.817	25,00			30.826.295	100		216.868.747	100	40,11		
			7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	27		333.912.800	11		130.784.452	9		67.657.140	33,33	3			14.926.478	0,00				15.899.817	33,33	3		30.826.295	14		161.610.747	51,85			
			7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	3		41.606.700	2		25.180.000	1		14.750.000	0,00	0,00			0,00			-	0,00	0		-	2		25.180.000	66,67					
			7	01	01	09	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3		165.178.930	1		30.078.000	1		225.980.000	0,00	0,00			0,00			-	0,00	0		-	1,00		30.078.000	33,33					

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															27,97		13,25	1,69		25,41	29,66		38,66			49,57	48,96		
Predikat Kinerja															SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	130.165.750	78,00	33.775.000	86,00	7.450.000	0,00		-	0,00		2.400.000	0,00		2.400.000	0,00		36.175.000	0,00	27,79	KEC. PUDING BESAR
		7	01	02	2	04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan (%)	100	130.165.750	75,00	33.775.000	100	7.450.000	25,00		-	0,00		2.400.000	25,00		2.400.000	75		36.175.000	75	27,79	
		7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	6500	130.165.750	4885	33.775.000	2580	7.450.000	0,00	254	-	0,00	290	2.400.000	0,00	544	2.400.000	5429	36.175.000	83,52	27,79	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12				12		25,00	3		0,00			25,00	3	-	3	-	25,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,00		0,00	0,00		32,21	25,00		32,21			54,26	27,79		
Predikat Kinerja															SR		SR	SR		SR	SR		SR			R	SR		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100	323.034.000	100	176.713.000	100	97.530.000	23,08		38.674.835	0,00		46.145.000	23,08		84.819.835	123		261.532.835	23	80,96	KEC. PUDING BESAR
		7	01	03	2	01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina (%)	100	323.034.000	100	176.713.000	100	97.530.000	23,08		38.674.835	0,00		46.145.000	23,08		84.819.835	100		261.532.835	100	80,96	
								Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang (%)	100		100		100		100			0,00			100			100		100			
								Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kecamatan (%)	100		100		100		100,00			0,00			100,00			100		100			
								Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong (%)	100		100		100		23,08			0,00			23,08			100		100			
		7	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	3	57.264.000	2	16.000.000	2	8.940.000	2,00	0	7.225.000	0,00		750.000	2,00	0	7.975.000	2	23.975.000	66,67	41,87	
								Musrenbang Tingkat Desa (kali)	27		14		7		7,00	0		0,00			7,00	0	-	14	-	51,85			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaga)	49				49		100	49		0,00			100	49	-	49	-	100,00			
		7	01	03	2	01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gobng royong yang dilakukan dalam satu tahun (kali)	252	265.770.000	168	160.713.000	168	88.590.000	0,00	42	31.449.835	0,00	42	45.395.000	0,00	84	76.844.835	252	237.557.835	100,00	89,38	
								Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan (kali)	252		168		168		0,00	42		0,00	42		0,00	84	-	252		100,00			
								Penilaian lomba desa /Kel k. Kecamatan (kali)	3		2		2		0,00	1		0,00	0,00		0,00	1	-	3		100,00			
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	26				26		23,08	6		0,00	0,00		23,08	6	-	6		23,08			

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				61,54		39,65	0,00		47,31	61,54		86,97				77,37	65,63	
Predikat Kinerja																				R		SR	SR		SR	R		T				T	S	
4	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	82.750.000	90,00	11.200.000	100	14.150.000	25,00		75.000	0,00		3.800.000	25,00		3.875.000	115,00	15.075.000	115,00	18,22	KEC. PUDING BESAR					
		7	01	04	2	03		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase Tomas/ Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	94,00	82.750.000	90,00	11.200.000	94,00	14.150.000	25,00		75.000	0,00		3.800.000	25,00		3.875.000	90,00	15.075.000	95,74	18,22						
		7	01	04	2	03	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (kali)	6	82.750.000	4	11.200.000	2	14.150.000	0,00	0	75.000	0,00	1	3.800.000	0,00	1	3.875.000	5	15.075.000	83,33	18,22						
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	24			24			25,00	6		0,00	0	25,00	6		-	6	-	25,00							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				25,00		0,53	0,00		26,86	25,00		27,39				54,17	18,22	
Predikat Kinerja																				SR		SR	SR		SR	SR		SR			R	SR		
5	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016) (%)	100	140.923.250	100	37.975.000	100	23.750.000	25,47		-	0,00		5.600.000	25,47		5.600.000	100	43.575.000	100	30,92	KEC. PUDING BESAR					
									Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar (%)	100		100		100		25,47		0,00			25,47			100		100								
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar (%)	100	140.923.250	100	37.975.000	100	23.750.000	0,00		-	0,00		5.600.000	0,00		5.600.000	100	43.575.000	100	30,92						
	Meningkatnya Pembinaan dan Monitoring Keuangan Desa								Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa (%)	100		100		100		0,00		0,00			0,00			100		100								
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	01	06	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	21	140.923.250	14	37.975.000	0	23.750.000	0,00	2	-	0,00	3,00	5.600.000	0,00	5	5.600.000	19	43.575.000	90,48	30,92						
									Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	21		14		0		0,00	2		0,00	3,00		0,00	5	-	19	-	90,48							
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	161			161			25,47	41		0,00		25,47	41	-	41	-	25,47								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				25,47		0,00	0,00		23,58	25,47		23,58				68,81	15,46	
Predikat Kinerja																				SR		SR	SR		SR	SR		SR			S	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KECAMATAN PUDING BESAR																				3.911.307.840		537.880.093			1.015.540.604			1.553.420.697		6.980.462.235				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar (%)																				33,00		13,75	0,34		25,96	33,33		39,72			60,84	68,54		
Predikat Kinerja Seluruh Program Kecamatan Puding Besar																				SR		SR	SR		SR	SR		SR			R	S		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																																		

DISUSUN  
Puding Besar, 03 Juli 2023  
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19841130 200212 1 002

DIEVALUASI  
Sungailiat, 05 Juli 2023  
KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661214 199203 1 004



Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Puding Besar pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2023**

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja baik berupa penambahan atau pengurangan target kinerja, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023.

Mengingat proyeksi keuangan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang lebih besar dari pada APBD Induk Kabupaten Bangka Tahun 2023, maka pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 dilaksanakan penambahan pagu indikatif. Sebaliknya Kecamatan Puding Besar melaksanakan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif yang berimplikasi pada penambahan sub kegiatan serta pengurangan dan penambahan target output pada tataran sub kegiatan.

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.911.307.840,- mengalami penambahan sebesar Rp. 857.284.896,- dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.768.592.736,- terdiri dari Belanja Langsung. Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kantor Kecamatan Puding Besar.

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif dapat dilihat pada table 3.1.a dan table 3.2.b terlampir.

**Tabel 3.1.a**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN PAGU KECAMATAN PUDING BESAR SESUAI**  
**PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA 2022**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	11	11	-
3.	Sub Kegiatan	30	32	2
4.	Ouput Sub Kegiatan	30	32	2
5	Pagu Anggaran	3.911.307.840	4.768.592.736	857.284.896

Kegiatan yang ditambahkan pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**A. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub kegiatan yang ditambahkan pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ouput Kegiatan yang ditambahkan pada Perubahan Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah:

1. Output sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berupa jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 4 Orang.
2. Output Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan sebanyak 1 UNIT Mobil

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Pertambahan Anggarannya Pada table 3.1.b dibawah ini:

Tabel 3.1.b

Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Anggarannya

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
<b>1</b>	<b>Program</b>	<b>3.865.957.840</b>	<b>4.723.242.736</b>	<b>857.284.896</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.768.427.840	4.575.712.736	807.284.896
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.530.000	147.530.000	50.000.000
<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1.460.060.640</b>	<b>2.317.345.536</b>	<b>857.284.896</b>
<b>7.01.01</b>		<b>1.362.530.640</b>	<b>2.169.815.536</b>	<b>807.284.896</b>
02.7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.915.000	62.915.000	30.000.000
02.7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.485.850	361.934.362	75.448.512
02.7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.475.665	535.475.665	375.000.000
02.7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.266.985	694.991.241	120.724.256
02.7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.387.140	514.499.268	206.112.128
<b>7.01.03</b>		<b>97.530.000</b>	<b>147.530.000</b>	<b>50.000.000</b>
02.7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	97.530.000	147.530.000	50.000.000

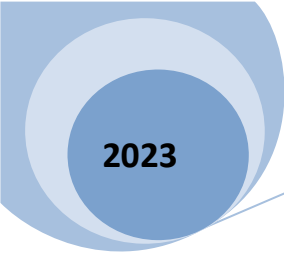
3	Sub Kegiatan	1.252.699.330	2.109.984.226	857.284.896
<b>7.01.01</b>		<b>1.164.109.330</b>	<b>1.971.394.226</b>	<b>807.284.896</b>
03.7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	0	30.000.000	30.000.000
03.7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.817.290	247.817.290	75.000.000
03.7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.834.280	57.058.536	224.256
03.7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.834.280	57.058.536	224.256
03.7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	350.000.000	350.000.000
03.7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.136.715	74.136.715	25.000.000
03.7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	447.376.545	567.876.545	120.500.000
03.7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.473.080	87.697.336	224.256
03.7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.657.140	73.769.268	6.112.128
03.7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.980.000	425.980.000	200.000.000
<b>7.01.03</b>		<b>88.590.000</b>	<b>138.590.000</b>	<b>50.000.000</b>
03.7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.590.000	138.590.000	50.000.000

4	Output Kegiatan	1.252.699.330	2.109.984.226	857.284.896
<b>7.01.01</b>		<b>1.164.109.330</b>	<b>1.971.394.226</b>	<b>807.284.896</b>
04.7.01.01.2.05.09	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	30.000.000	30.000.000
04.7.01.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.817.290	247.817.290	75.000.000
04.7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.834.280	57.058.536	224.256
04.7.01.01.2.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.834.280	57.058.536	224.256
04.7.01.01.2.07.02	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	350.000.000	350.000.000
04.7.01.01.2.07.06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49.136.715	74.136.715	25.000.000
04.7.01.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	447.376.545	567.876.545	120.500.000
04.7.01.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	87.473.080	87.697.336	224.256
04.7.01.01.2.09.02	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67.657.140	73.769.268	6.112.128
04.7.01.01.2.09.10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	225.980.000	425.980.000	200.000.000
<b>7.01.03</b>		<b>88.590.000</b>	<b>138.590.000</b>	<b>50.000.000</b>
04.7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.590.000	138.590.000	50.000.000

### 3.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Secara keseluruhan, hasil telaahan kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 terinci dalam Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana terlampir.





Tabel 3.2  
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 KABUPATEN BANGKA									
OPD : KECAMATAN PUDING BESAR									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.768.427.840,00			4.575.712.736,00	807.284.896,00	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,00		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,00			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11,00		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11,00			
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaa kinerja yang disusun sesuai standar	100%	13.750.000,00	Persentase perencanaa kinerja yang disusun sesuai standar	100%	13.750.000,00		
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%			
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.650.000,00	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.650.000,00	-	
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	840.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.900.000,00	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.900.000,00	-	
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	840.000,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	840.000,00	-	

		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0%		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI	0%			
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.392.147.200,00	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.392.147.200,00		
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%			
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	19 Orang/bulan	2.374.477.200,00	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	19 orang/bulan	2.374.477.200,00	-	
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.990.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.990.000,00	-	
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keunagan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	840.000,00	Jumlah Laporan Keunagan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 Dokumen	840.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 Dokumen	840.000,00	-	

		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	60,50		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	60,50			
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	41,17%	32.915.000,00	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	41,17%	62.915.000,00	30.000.000,00	
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			
		Persentase aparat yang penilaian kinerjanya baik	100%		Persentase aparat yang penilaian kinerjanya baik	100%			
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	32.075.000,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	32.075.000,00	-	
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	840.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	840.000,00	-	
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	-	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	30.000.000,00	30.000.000,00	
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,5		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,5			
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase arsip yang dikelola sesuai Peraturan	100%	286.485.850,00	Persentase arsip yang dikelola sesuai Peraturan	100%	361.934.362,00	75.448.512,00	
		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172.817.290,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	247.817.290,00	75.000.000,00	
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	56.834.280,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	57.058.536,00	224.256,00	
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	56.834.280,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	57.058.536,00	224.256,00	
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	100,00		Indeks sarana dan prasarana aparatur	100,00			

7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah	100%	160.475.665,00	Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah	100%	535.475.665,00	375.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	48.788.950,00	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	48.788.950,00	-	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	49.136.715,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	74.136.715,00	25.000.000,00	
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	62.550.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	62.550.000,00	-	
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	-	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasana pendukung kinerja Pemerintah	100%	574.266.985,00	Persentase pemenuhan sarana prasana pendukung kinerja Pemerintah	100%	694.991.241,00	120.724.256,00	
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	447.376.545,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	567.876.545,00	120.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.417.360,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.417.360,00	-	
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.473.080,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.697.336,00	224.256,00	

7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	308.387.140,00	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	514.499.268,00	206.112.128,00	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	67.657.140,00	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	73.769.268,00	6.112.128,00	
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	14.750.000,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	14.750.000,00	-	
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	225.980.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	425.980.000,00	200.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.450.000,00			7.450.000,00	-	
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%			
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	7.450.000,00	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	7.450.000,00	-	
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	7.450.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	7.450.000,00	-	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			97.530.000,00			147.530.000,00	50.000.000,00	
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%			
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	97.530.000,00	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	147.530.000,00	50.000.000,00	
		Persentase Desa yg Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100%		Persentase Desa yg Masyarakatnya Aktif dalam Musrenbang	100%			
		Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%		Persentase Desa yang Mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%			
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Gotong Royong	100%		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Gotong Royong	100%			
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	49 Lembaga	8.940.000,00	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpasrtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	49 Lembaga	8.940.000,00	-	
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	88.590.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	138.590.000,00	50.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.150.000,00			14.150.000,00	-	
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%			
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	14.150.000,00	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100%	14.150.000,00	-	
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	14.150.000,00	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	14.150.000,00	-	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			23.750.000,00			23.750.000,00	-	
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%			
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%			
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating Profil Desa sesuai Standar	100%	23.750.000,00	Persentase Desa melaksanakan up dating Profil Desa sesuai Standar	100%	23.750.000,00		
		Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monitoring Keuangan Desa	100%		Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monitoring Keuangan Desa	100%			
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	161 Dokumen	23.750.000,00	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	161 Dokumen	23.750.000,00	-	
JUMLAH				3.911.307.840,00			4.768.592.736,00	857.284.896,00	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah kabupaten Bangka tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bangka. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bangka

Puding Besar, 21 Agustus 2023  
CAMAT PUDING BESAR



**ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 19841130 200212 1 002**



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN PUDING BESAR

Jalan Raya Sungailiat-Mentok, Puding Besar 33179 Kep.Bangka Belitung  
Telepon 08117117666, Email : [kec.pudingbesar@gmail.com](mailto:kec.pudingbesar@gmail.com)

### KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/039.1/19.01.08/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

#### TAHUN 2023

#### CAMAT PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2022 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Puding Besar Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023;

- d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Kepala Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puding Besar  
pada tanggal 05 Juni 2023

**CAMAT PUDING BESAR,**



**ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si**  
**PENATA TK I**  
**NIP. 19841130 200212 1 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUDING BESAR  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 188.45 /039.1/ 19.01.08 / 2023  
TANGGAL : 05 Juni 2023

**SUSUNAN TIM PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Arie Pamungkas,S.STP,M.Si	Ketua
2.	Ramdhan Usman,S.IP	Wakil Ketua
3.	Aminah, SE	Anggota
4.	M. Irfan, SE	Anggota
5.	Muhammad Nasri, S.IP	Anggota
6.	Marga Ansori Abdi, S.Ag	Anggota
7.	Zia Ulhaq, S.Hum	Anggota
8.	Fitriani	Anggota
9.	Dalina	Anggota

Ditetapkan di Puding Besar  
pada tanggal 05 Juni 2023

**CAMAT PUDING BESAR,**



**ARIE PAMUNGKAS, S.STP,M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19841130 200212 1 002**

**JADWAL TENTATIF  
TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KET</b>
1	SK Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023	5 Juni 2023	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2023	
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2023	
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2023	
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2023	21 Juli 2023	
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	23 Juli-4 Agustus 2023	
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	4-6 Agustus 2023	
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	6- 16 Agustus 2023	
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Agustus 2023	
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	21 Agustus 2023	